

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok selama periode 2019 hingga 2024 mengalami berbagai tantangan yang bersifat tarif maupun non-tarif, termasuk fluktuasi harga minyak global, pandemi COVID-19, kebijakan lingkungan internasional, serta hambatan struktural dalam rantai nilai global. Meski Indonesia merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar dunia, posisinya dalam rantai nilai global cenderung berada pada segmen hulu yang bernilai tambah rendah, sementara Tiongkok sebagai importir utama memegang kendali lebih besar dalam hal permintaan produk bernilai tinggi dan berstandar keberlanjutan tinggi (Gereffi, Humphrey, & Sturgeon, 2005; Taglioni & Winkler, 2016). Untuk menghadapi hambatan tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi diplomasi ekonomi yang mengacu pada empat tahapan menurut Kishan Rana (2007), yaitu *economic salesmanship*, *networking*, *image building*, dan *regulation management*.

Melalui pendekatan *economic salesmanship*, pemerintah memfasilitasi kesepakatan dagang dengan Tiongkok, mengikuti pameran dagang internasional, dan melakukan *pitching* ekspor. Pada tahap *networking*, Indonesia membangun relasi dengan asosiasi industri dan buyer utama di Tiongkok serta mendorong forum lintas aktor domestik dan internasional. Dalam hal *image building*, pemerintah menjalankan kampanye “Sawit Baik”, mengikuti forum CAEXPO, serta meluncurkan dashboard ketelusuran untuk memperkuat persepsi keberlanjutan

sawit Indonesia. Terakhir, dalam *regulation management*, Indonesia menyesuaikan regulasi ekspor seperti skema pungutan dan kebijakan DHE, serta memperjuangkan pengakuan sertifikasi ISPO di forum bilateral dan multilateral. Keempat strategi ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia bersifat proaktif dan adaptif terhadap dinamika perdagangan global, serta melibatkan kolaborasi erat antara negara dan pelaku industri untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas ekspor CPO ke Tiongkok.

4.2 Saran

Meskipun penelitian ini telah berupaya menjelaskan secara komprehensif mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan ekspor CPO ke Tiongkok melalui pendekatan diplomasi ekonomi, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, penelitian ini lebih menekankan pada analisis kebijakan dan inisiatif pemerintah dari sudut pandang makro dan dokumen sekunder, sehingga belum menggali perspektif langsung dari aktor kunci seperti pejabat diplomatik, eksportir, atau pelaku industri yang terlibat langsung dalam proses ekspor CPO. Kedua, keterbatasan akses terhadap data statistik ekspor CPO yang bersifat tersegmentasi per produk dan mitra dagang juga membatasi kedalaman analisis kuantitatif dalam penelitian ini. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap aktor-aktor strategis seperti perwakilan Kementerian Perdagangan, GAPKI, eksportir, serta buyer dari Tiongkok, guna memperoleh pemahaman lebih holistik dan praktis terkait dinamika

diplomasi perdagangan CPO. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat memperluas fokus wilayah studi dengan melakukan perbandingan antara strategi Indonesia terhadap Tiongkok dan negara mitra lainnya, seperti India atau negara-negara Uni Eropa, guna mengkaji diferensiasi pendekatan diplomasi ekonomi dalam konteks yang lebih luas dan multilateral.